

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**MATA KULIAH
KEBIJAKAN PUBLIK DAN APLIKASINYA**

NAMA : Jumain

NPM : 2526061015



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

1. Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap tahun melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi, Bandar Lampung menghadapi tantangan serius dalam mengelola tata ruang, drainase, dan lingkungan hidup. Fenomena banjir di kota ini sering terjadi terutama pada musim penghujan, ketika curah hujan yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung saluran drainase dan semakin berkurangnya daerah resapan air.

Wilayah Kota Bandar Lampung dilanda banjir besar pada bulan Januari 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung mencatat sebanyak 11.223 jiwa terdampak banjir tersebut. Berdasarkan rekapitulasi kejadian bencana, banjir pada bulan Januari telah melanda 16 kecamatan dari total 20 kecamatan dan 79 kelurahan dari 124 kelurahan. Pada bulan Februari 2025, sebanyak 9.022 rumah dan 30.850 jiwa kembali terdampak banjir yang melanda 14 kecamatan. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa banjir bukanlah peristiwa insidental, melainkan masalah struktural yang berulang setiap tahun.

Selain faktor alam, aktivitas manusia menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun pusat perdagangan, pembuangan sampah ke sungai, serta pembangunan tanpa perencanaan tata ruang yang berkelanjutan memperburuk kerentanan wilayah terhadap banjir. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola lingkungan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

Banjir di Bandar Lampung tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa rusaknya infrastruktur, permukiman, dan fasilitas publik, tetapi juga membawa dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Aktivitas pendidikan dan perdagangan kerap terhambat, distribusi barang dan transportasi terganggu, serta muncul berbagai penyakit pasca-banjir yang mengancam kesehatan masyarakat. Dengan demikian, banjir di Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai masalah publik yang kompleks, karena menyangkut kepentingan banyak pihak dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Berdasarkan pandangan tersebut, banjir harus diposisikan sebagai isu kebijakan publik yang urgent karena menyangkut kepentingan umum (*public interest*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dan keberlanjutan pembangunan kota. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan publik yang terencana, integratif, dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Bandar Lampung. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah menjadi kunci utama untuk menciptakan solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pencegahan dan mitigasi risiko bencana.

2. Strukturisasi Masalah

Masalah Utama

Banjir berulang di Bandar Lampung yang menimbulkan kerugian di berbagai aspek.

Penyebab

- a. Faktor alam: curah hujan tinggi, perubahan iklim.
- b. Faktor manusia: alih fungsi lahan, drainase buruk, sampah di sungai.
- c. Tata kelola: lemahnya penegakan hukum, buruknya perencanaan tata ruang, minimnya edukasi publik.

Dampak

- a. Kerugian ekonomi (kerusakan rumah, infrastruktur, penurunan produktivitas).
- b. Gangguan pendidikan, transportasi, perdagangan.
- c. Penyakit pasca-banjir (diare, leptospirosis, infeksi kulit).
- d. Potensi konflik sosial.

4. Analisis Masalah

Banjir di Bandar Lampung bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan yang berulang hampir setiap musim hujan. Setiap kali hujan deras turun, kawasan di Bandar Lampung sering dilanda banjir dengan ketinggian air mencapai 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Kejadian ini menimbulkan kerugian yang luas yang mengakibatkan rumah warga terendam, akses jalan terputus, sekolah diliburkan, hingga aktivitas ekonomi dan transportasi lumpuh.

Masalah banjir di Bandar Lampung, penting untuk menempatkannya dalam kerangka teori kebijakan publik. Dye (1972) menegaskan bahwa *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Artinya, kebijakan bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mencakup pilihan untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks banjir, keterlambatan pemerintah dalam membangun infrastruktur drainase, lemahnya pengawasan tata ruang, atau minimnya program edukasi publik dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan untuk tidak bertindak (*non-decision policy*). Sikap pasif ini membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya kerugian ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat akibat banjir yang berulang setiap tahun.

Kay (2006) menekankan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan dengan pilihan tujuan, instrumen, dan respons. Dalam konteks banjir, tujuan kebijakan seharusnya tidak hanya terbatas pada penanganan darurat pasca-bencana, tetapi juga meliputi perlindungan keselamatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan kota. Instrumen kebijakan yang tersedia mencakup pembangunan drainase perkotaan, normalisasi sungai, penegakan aturan tata ruang, hingga kampanye edukasi lingkungan. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah respons pemerintah yang cenderung reaktif. Pemerintah lebih sering mengalokasikan sumber daya untuk penanganan pasca-banjir dibandingkan investasi jangka panjang untuk pencegahan dan mitigasi. Hal ini menyebabkan akar persoalan banjir tidak terselesaikan.

Howlett & Ramesh (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik berjalan melalui *policy cycle* yang terdiri dari lima tahap: *agenda setting*, *policy formulation*, *decision making*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Jika ditinjau dengan kerangka ini, banjir di Bandar Lampung jelas sudah menjadi isu publik penting pada tahap *agenda setting*. Namun, masalah

utama muncul pada tahap *formulation* dan *implementation*, misalnya keterbatasan anggaran untuk drainase, lemahnya koordinasi lintas dinas, serta tidak adanya konsistensi dalam pengendalian tata ruang. Pada tahap *evaluation*, kelemahan semakin terlihat karena sering kali evaluasi dilakukan secara administratif tanpa tindak lanjut yang nyata, sehingga kesalahan dan pola penanganan yang salah berulang dari tahun ke tahun.

Colebatch (1998) memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi kompleks antara aktor, institusi, dan kepentingan. Kasus banjir di Bandar Lampung menunjukkan bagaimana kompleksitas ini berlangsung. Pemerintah kota dan BPBD berperan sebagai pelaksana utama, kementerian pusat memberikan dukungan regulasi maupun infrastruktur, media massa membentuk opini publik, sementara masyarakat dan sektor swasta menjadi aktor yang terdampak sekaligus berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan. Sayangnya, koordinasi antar-aktor ini sering kali lemah, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat parsial dan tidak memberikan dampak signifikan.

Hogwood & Gunn (1984) mengingatkan bahwa kegagalan kebijakan sering disebabkan oleh tujuan yang tidak jelas, lemahnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Kondisi ini relevan dengan kasus di Bandar Lampung, di mana pembangunan drainase dilakukan secara parsial tanpa mengacu pada *master plan* jangka panjang, dan anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan skala kebutuhan mitigasi. Akibatnya, banjir tetap berulang meskipun pemerintah mengklaim telah melaksanakan berbagai program penanganan.

Selain itu, penelitian dalam Jurnal Tata Ruang (Vol. 11 No. 1, 2020) menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian tata ruang yang mengabaikan fungsi ekologis kawasan merupakan salah satu penyebab utama banjir di kota-kota besar Indonesia. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman dan komersial tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan semakin memperbesar risiko banjir. Situasi ini selaras dengan kondisi di Bandar Lampung, di mana urbanisasi dan pembangunan kota yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau serta kapasitas resapan air.

Dengan merujuk pada teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa banjir di Bandar Lampung bukan sekadar masalah teknis, tetapi lebih dalam merupakan masalah kebijakan publik. Persoalan ini menyangkut aspek pilihan kebijakan, konsistensi implementasi, serta efektivitas koordinasi antar-aktor. Oleh karena itu, solusi tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik semata, tetapi membutuhkan kebijakan integratif yang mencakup semua tahapan dalam *policy cycle*: penetapan banjir sebagai agenda prioritas, perumusan kebijakan yang realistis, pengambilan keputusan yang konsisten, implementasi yang terkoordinasi, serta evaluasi berbasis data. Dengan pendekatan kebijakan publik yang menyeluruh, penanganan banjir di Bandar Lampung dapat diarahkan menuju keberlanjutan, sekaligus mengurangi risiko kerugian sosial dan ekonomi di masa mendatang.

5. Partisipan: Aktor dan Institusi

Pemerintah

- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung: kebijakan tata ruang, perbaikan drainase.
- b. BPBD: koordinasi tanggap darurat dan evakuasi.
- c. Kementerian PUPR: pembangunan infrastruktur nasional.

- d. KLHK: penghijauan, konservasi daerah resapan.

Non-Pemerintah

- a. Masyarakat: menjaga lingkungan, gotong royong, komunitas siaga banjir.
- b. Media: membentuk opini publik, memberi informasi cepat.
- c. Swasta: dukungan dana dan CSR.
- d. LSM: advokasi tata ruang, pendampingan masyarakat.
- e. Akademisi: penelitian, inovasi mitigasi banjir.

6. Kebijakan Publik yang Sesuai

- a. Penguatan Infrastruktur Drainase dan Tata Ruang
Normalisasi sungai, pelebaran drainase, pembangunan sumur resapan. dan Penegakan hukum tata ruang.
- b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Minimal 30% luas kota dialokasikan sebagai RTH.
- c. Program penghijauan berbasis komunitas dengan insentif.
- d. Pemberdayaan Masyarakat dengan Edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, komunitas siaga banjir.
- e. Kolaborasi Multi Pihak dengan Sinergi pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat sipil.

7. Kesimpulan

Banjir di Kota Bandar Lampung merupakan masalah publik yang kompleks dan berulang setiap tahun, dipicu oleh kombinasi faktor alam, aktivitas manusia, serta lemahnya tata kelola lingkungan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga meluas ke ranah sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan permasalahan kebijakan publik yang membutuhkan penanganan menyeluruh.

Analisis dengan kerangka teori kebijakan publik menegaskan bahwa kegagalan pemerintah dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan drainase, serta minimnya edukasi dan partisipasi masyarakat merupakan bentuk *non-decision policy* yang memperparah kerentanan kota terhadap banjir. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-aktor dan keterbatasan sumber daya membuat penanganan banjir selama ini cenderung reaktif, fokus pada respon darurat pasca-bencana, bukan pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang.

Oleh karena itu, solusi yang tepat memerlukan kebijakan publik yang integratif, konsisten, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh actor pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, akademisi, serta media. Upaya tersebut meliputi penguatan infrastruktur drainase dan penegakan tata ruang, pengembangan ruang terbuka hijau, program penghijauan berbasis komunitas, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi multipihak. Dengan strategi ini, penanganan banjir di Bandar Lampung dapat diarahkan pada pengurangan risiko bencana, perlindungan kepentingan publik, dan keberlanjutan pembangunan kota.

8. Daftar Pustaka

- Colebatch, H. K. (1998). *Policy*. Buckingham: Open University Press.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford: Oxford University Press
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Kay, A. (2006). *The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Jurnal Tata Ruang. (2020). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Mitigasi Banjir di Kawasan Perkotaan*. Vol. 11 No. 1.
- <https://regional.kompas.com/read/2025/02/24/103305278/9022-rumah-dan-30850-jiwa-terdampak-banjir-di-bandar-lampung>.
- <https://news.detik.com/berita/d-7739868/11-223-orang-terdampak-banjir-di-bandar-lampung>